BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian.

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

Kebijakan pengawasan penyelengaraan Pemerintah daerah itu sendiri bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksankan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), menanggulangi masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan kewenangan negara, pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah .

Didalam menunjang pembangunan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka salah satu pelaksanaan fungsi manajemen yaitu pengawasan haruslah dijalankan, pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang lebih ditetapkan sesuai perundangan yang belaku.

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Bandung mengacu kepada landasan hukumm yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelewengan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidanan Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelewengan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelewengan Pemerintah Daerah;
9. Keppres Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Mendagri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gurbenur.
11. Keputusan Mendragi Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

12. Peratuaran Daerah Nomor : 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
13. Keputusan Walikota Bandung Nomor 989 Tahun 2002 tentang Pedoman Opersioanl Pengawasan.

Sejalan dengan semangat reformasi dan amanat perjuangan seperti yang tersirat dalam undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawababan pelaksanaan kegiatan (hasil evaluasi pencapaian tujua organisasi).

Inspektorat Kota Bandung telah menyusun Rencana Startegi yang akan diimplementasikan secara konsisten guna menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Rencana Startejik tersebut memuat rumusan visi, misi dan program-program yang merupakan panduan dalam mengembangkan berbagai kegiatan pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kota Bandung, yaitu melaksankan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kekayaan daerah.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemabagian Urusan Pemerintah Antaran Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka

dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung.

Inspektorat merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan betangungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Seketaris Daerah.

Insperktorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelengaraan di daerah, untuk melaksanakan tugas pokok, inspektorat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program pengawasan.
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
c. Pemeriksaan, pengutusan, pengujuan, dan penilaian tugas pengawasan.
d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi Badan Inspektorat Kota Bandung adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahaan yang bermartabat melalui Pengawasan yang profesional dan bertanggungjawab.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut, yaitu :

Pertama, Inspektorat Kota Bandung sebagai lembaga teknis daerah harus dapat membatu Walikota dalam meningkatkan penegakan aturan, meminimalisir praktek KKN, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan penyelewengan kewenangan, pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainya yang dapat mengahambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintahan melalui pengawasan secara profesioanl.

Kedua, Inspektorat Kota Bandung sebagai lembaga teknis daerah dalam membantu walikota harus dapat mepertanggung-jawabkan hasil pengawasannya baik kepada Tuhan Mahasa Esa maupun kepada negara/masyarakat.

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka Inspektorat Kota Bandung mempunyai misi sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap sistem, mekanisme, peraturan yang telah ditetapkan:
2. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselengaranya pemerintahan yang baik melalui pengawasan internet/fungsional.
3. Mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang professional, akuntabel, efektif dan efisien serta responsif.
4. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam pengambilan keputusan pimpinan untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah.
5. Menumbuhkan sinergi antar aparat pengawasan.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Susuanan Organisasi Inspektorat Kota Bandung:

a. Inspektur;

b. Seketariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan.
2. Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan
3. Sub Bagian Adminitrasi dan Umum.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I:

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah I.
3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarkatan Wilayah I.

d. Inspektur Pembantu Wilah II:

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II.
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah II.
3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarkatan Wilayah II.

e. Inspektur Pembantu Wilah III:

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III.
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah III.
3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarkatan Wilayah III.

f. Inspektur Pembantu Wilah III:

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III.
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah III.
3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarkatan Wilayah III.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.3 Deskripsi Tugas (*Job Description*)

1. Seketaris mempunyai tugas pokok menyiapakan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur dilingkungan Inspektorat, seketaris meyelenggarakan fungsi :
   a. Peleksanaan penyususnan rencana kegiatan kesekretarisan.
   b. Penyaiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan
   c. Pelaksanaan penghimpunan,pengelolaaan, penilaian dan penyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah.
   d. Pelaksanaan penyususnan badan/data pembinaan tekanis fungsional.
   e. Pelaksanaan penginvestigasian, penyususunan dan pengkoordinasian penetausahaan proses penanganan pengaduan.
   f. Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
   g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat dan,
   h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.
2. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang perencanaan.

a. Penyiapkan badan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan.
b. Penyipanpan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
c. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
d. Penyususnan anggaran Inspektorat
e. Pelaporan kegiatan perencanaan.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang evaluasi dan pelaporan.
   a. Pelaksanaan invetarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
   b. Pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan.
   c. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
   d. Pelaksanaan penyusunanan laporan hasil pengawasan.
   e. Penyusunan statistic hasil pengawasan
   f. Penyelengaraan kerjasama pengawasan.
   g. Pelaporan kegiatan eavaluasi dan pelapoan.
4. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang administrasi dan umum, mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaaan administrasi meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelengaraan kerumahtanggan, keprotokolan dan adminitrasi perjalanan dinas.
b. Pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
c. Pelaksanaan pengeloaan urusan keuangan.
d. Pelaporan kegiatan di bidang administrasi dan umum.

5. Inspektur Pembantu mempunyai tugas poko melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di instansi/satuan kerja perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya, mempunyai fungsi:
   a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya.
   b. Pengkordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya.
   c. Pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian.
   d. Pelaksnaan evaluasi hasil pengawasan.
   e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.
6. Seksi pengawasan pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pmebantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pembangunan sesuai wilayah kerjanya, memnpunyai fungsi:
   a. Pengusulan program pengawasan bidang pembangunan.
   b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan.

c. Pelaksnaan pengawasan terhadap penyelenggraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan.

d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembanguan.

e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pembangunan.

7. Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan sesuai wilayah kerjanya, mempunyai fungsi:

a. Pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan.

c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelengaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan.

d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, penguajian dan penialain tugas pengawasan di bidang Pemerintahan.

8. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pemerintahan.Seksi Pengawasan Kemasyarakatan, mempunyai fungsi:

a. Pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan.

c. Pelaksaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan.

d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penialaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan.

e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang kemasyarakatan.

4.1.3.1 Aktivitas Perusahaan

Setiap Inspektur Pembantu yang dibantu oleh masing-masing Seksi Pengawasan sesuai bidang tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap instansi/satuan kerja perangkat daerah bedasarka wilayah kerja.

Wilayah sebagaimana dimaksud, masing-masing terdiri dai instansi/ satuan kerja perangkat daerah yaitu:

a. Wilayah I, meliputi:

1. Dinas Bina Marga dan Pengairan
2. Dinas Perhubungan
3. Dinas Kebakaran
4. Badan Perencanaan Pembangunaan Daerah
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
6. Badan Kepegawaian Daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Rumah Sakit Umum Daerah
9. Perusahaan Daerah Pasar Bermatabat
10. Bagian Pemerintahan Umum
11. Bagian Keuangan
12. Kecamatan Sukasari
13. Kecamatan Sukajadi
14. Kecamatan Cicendo

15. Kecamatan Andir
16. Kecamatan Cidadap
17. Kecamatan Coblong
18. Kecamatan Bandung Wetan
19. Kecamatan Cibeunying Kaler

b. Wilayah II, meliputi:

1. Asisten Pemerintahan
2. Dinas Pendapatan
3. Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

c. Wialyah III, meliputi:

1. Badan Pengeloaan Lingkunagn Hidup
2. Badan Kesbeang Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
4. Bagaian Hukum dan HAM
5. Bagain Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
6. Bagian Umum dan Perlengaklapan
7. Kecamatan Bandung Kulon
8. Kecamatan Bojongloa Kaler
9. Kecamatan Babakan Ciparay

10. Kecamatan Bojongloa Kidul
11. Kecamatan Astanaanyar
12. Kecamatan Bandung Kidul
13. Kecamatan Buahbatu

d. Wilayh IV, meliputi:

1. Asisten Administrasi Umum
2. Dinas Tenaga Kerja
3. Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Perdagangan.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5. Dinas Pertamanan
6. Badan Komunikasi dan Informatika
7. Kantor Pengeloaan Pemakaman
8. Perusahaan Daerah Air Minum
9. Bagian Perekonomian
10. Bagian Ketahanan Pangan
11. Bagian Tata Usaha Pimpinan
12. Kecamatan Rancasari
13. Kecamatan Panyileukan
14. Kecamatan Gedebage
15. Kecamatan Cibiru
16. Kecamatan Ujungberung
17. Kecamatan Mandalajati

18. Kecamatan Cinambo

19. Kecamatan Arcamanik

4.1.4 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis adalah sebanyak 30 responden dari karyawan-karyawati Inspetorat Kota Bandung dari bagian keuangan dan Administrasi dan Umum :

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelami

Jenis Kelamin	Respon
Jaki-laki	18
Perempuan	12
Total	30

Tabel 4.2
Distribusi Jawaban Responden Laki- laki mengenai Pengawasan Fungsional Berdasarkan Jenis kelamin Pada Inspektorat Kota Bandung

Respon	Bobot	F	%	Skor aktual
Sangat setuju	5	168	62,22%	840
Setuju	4	60	22,22%	240
Ragu –ragu	3	23	8,52%	69
Tidak setuju	2	17	6,3%	34

Sangat Tidak setuju	1	2	0,74%	2
TOTAL		270	100%	1185

Sumber : Data primer yang telah diolah (2010)

Total Frekuensi = jumlah Responden X Jumlah Pertanyaan

= 18 X 15

= 270

Tabel 4.3
Distribusi Jawaban Responden Perempuan mengenai Pengawasan Fungsional Berdasarkan Jenis kelamin Pada Inspektorat Kota Bandung

Respon	Bobot	F	%	Skor aktual
Sangat setuju	5	60	33,33%	300
Setuju	4	58	32,22%	232
Ragu –ragu	3	30	16,67%	90
Tidak setuju	2	30	16,67%	60
Sangat Tidak setuju	1	2	1,11%	2
TOTAL		180	100%	684

Sumber : Data primer yang telah diolah (2010)

Total Frekuensi = jumlah Responden X Jumlah Pertanyaan

= 12 X 15

= 180

Berdasarkan data diatas maka rekpitulasi tanggapan responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Berdasarkan Jenis kelamin mengenai Pengawasan Fungsional Pada Inspektorat Kota Bandung

Jenis Kelamin	F	Skor aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
Laki-laki	18	1185	1350	87,78%	Sangat Baik
Perempuan	12	684	900	76%	Baik
TOTAL	30	1869	2250	83,07%	Baik

Sumber : Data primer yang telah diolah (2010)

- Skor ideal Laki-laki = Jumlah Responden X Nilai Tertnggi X Jumlah Pertanyaan

Skor Ideal = 18 x 5 x 15

= 1350

$$\% \text{ Skor Aktual Laki-laki} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual Laki –laki} = \frac{1185}{1350} \text{ X } 100\%$$

= 87,78%

- Skor ideal Perempuan = Jumlah Responden XNilai Tertnggi X Jumlah Pertanyaan

Skor ideal = 12 x 5 x 15

= 900

$$\% \text{ Skor Aktual Perempuan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual Perempuan} = \frac{684}{900} X\ 100\%$$

$$= 76\%$$

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Pengawasan Fungsional pada Inspektorat kota Bandung yang terpilih sebagai responden. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang jenis kelamin priaLaki-laki memilih dengan skor sebesar 87,78% dan responden yang berjenis kelamin Perempuan sebesar 76% jadi dapat disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin Laki-laki menganggap bahwa pengawasan Fungsional sudah berjalan Sangat Baik. Sedangkan responden yang berjenis kelamin Perempuan menyatakan bahwa Pengawasan Fungsional berjalan Baik, Ini menunjukan bahwa staff laki –laki lebih banyak di bandingkan staff perempuan pada Staff Administrasi & Umum.

Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin mengenai keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Distribusi Jawaban Responden Laki-laki mengenai Keuangan Daerah berdasarkan jenis kelamin Pada Inspektorat Kota Bandung

Respon	Bobot	F	%	Skor aktual
Sangat setuju	5	144	53,33%	720
Setuju	4	95	35,19%	380
Ragu –ragu	3	21	7,78%	63
Tidak setuju	2	10	3,7%	20

Sangat Tidak setuju	1	0	0%	0
TOTAL		270	100%	1153

Sumber : Data Primer yang telah diolah (2010)

Total Frekuensi = Jumlah Responden X Jumlah pertanyaan

= 18X 15

= 270

Tabel 4.6
Distribusi jawaban Responden Perempuan mengenai Keuangan Dearah Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Inspektorat kota Bandung

Respon	Bobot	F	%	Skor aktual
Sangat setuju	5	81	45%	405
Setuju	4	62	34,44%	248
Ragu –ragu	3	37	20,56%	111
Tidak setuju	2	0	0%	0
Sangat Tidak setuju	1	0	0%	0
TOTAL		180	100%	764

Sumber : Data Primer yang telah diolah (2010)

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Berdasarkan Jenis kelamin mengenai Keuangan Daerah Pada Inspektorat Kota Bandung

Jenis Kelamin	F	Skor aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
Laki-laki	18	1153	1350	85,41%	Sangat Baik
Perempuan	12	764	900	84,89%	Baik
TOTAL	30	1917	2250	85,2%	Sangat Baik

Sumber : Data Primer yang telah diolah (2010)

- Skor ideal Laki-laki = Jumlah Responden X Nilai Tertnggi X Jumlah Pertanyaan

Skor Ideal = 18 x 5 x 15

= 1350

$$\% \text{ Skor Aktual Laki-laki} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual Laki –laki} = \frac{1153}{1350} \text{ X } 100\%$$

= 85,41%

- Skor ideal Perempuan=Jumlah Responden XNilai Tertnggi X Jumlah Pertanyaan

Skor ideal = 12 x 5 x 15

= 900

$$\% \text{ Skor Aktual Perempuan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual Perempuan} = \frac{764}{900} \text{ X } 100\%$$

= 84,89%

Berdasarkan Tabel diatas penulis dapat mengetahui bahwa karyawan-karyawati Inspetorat Kota Bandung dari Staff Keuangan . Data yang diperoleh melalui kuesioner menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin Laki-laki

sebesar 85,41% berarti pada Staff keuangan ini Sangat Baik dan responden yang berjenis kelamin Perempuan sebesar 84,89% berarti pada Staff keuangan Baik. Ini menunjukan bahwa staff laki –laki lebih banyak di bandingkan staff perempuan pada Staff keuangan.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Mengenai Analisis Pengawasan Fungsional terhadap Keuangan Daerah pada Inspektorat Kota Bandung

No	Variabel	F	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengawasan Fungsional (X)	30	1869	2250	83,07%	Baik
2	Keuangan Daerah (Y)	30	1917	2250	85,02%	Sangat Baik

Berdasarkan Pada tabel diatas Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden sebanyak 30 responden Berdasarkan jenis kelamin menunjukan bahwa mengenai pengawasan fungsional sebesar 83,07% dikategorikan berjalan baik, dan mengenai keuangan daerah sebesar 85,02% dikategorikan berjalan sangat baik.

2. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Respon
1	D3	3
2	SI	18
3	S2	9
TOTAL		30

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden mengenai Pengawasan Fungsional (X) berdasarkan pendidikan terakhir D3 Pada Inspektorat Kota Bandung

Respon	Bobot	F	%	Skor aktual
Sangat setuju	5	17	86,67%	85
Setuju	4	12	4,44%	48
Ragu –ragu	3	15	6,67%	45
Tidak setuju	2	1	2,22%	2
Sangat Tidak setuju	1	0	0%	0
TOTAL		45	100%	180

Sumber : Data Primer yang telah diolah (2010)

Total Frekuensi = Jumlah Responden X Jumlah Pertanyaan

= 3 X 15

= 45

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengawasan Fungsional (X) Berdasarkan Pendidikan Terakhir SI Pada Inspektorat Kota Bandung

Respon	Bobot	F	%	Skor aktual
Sangat setuju	5	144	53,33%	720
Setuju	4	86	31,85%	344
Ragu –ragu	3	15	5,56%	45
Tidak setuju	2	21	7.78%	42
Sangat Tidak setuju	1	4	1,48%	4
TOTAL		270	100%	1155

Sumber : Data Primer yang telah diolah (2010)

Total Frekuensi = Jumlah Responden X Jumlah Pertanyaan

= 18 X 15

= 270

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengawasan Fungsional (X) BerdasarkanPendidikan Terakhir S2 Pada Inspektorat Kota Bandung

Respon	Bobot	F	%	Skor aktual
Sangat setuju	5	66	48,89%	330
Setuju	4	25	18,52%	100
Ragu –ragu	3	28	13,33%	84
Tidak setuju	2	16	4,44%	32
Sangat Tidak setuju	1	0	0%	0
TOTAL		135	100%	546

Sumber : Data Primer yang telah diolah (2010)

Total Frekuensi = Jumlah Responden X Jumlah Pertanyaan

= 9 X 15

= 135

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir mengenai Pengawasan Fungsional (X) Pada Inspektorat Kota Bandung

No	Pendidikan	F	Skor aktual	Skor Ideal	% % Skor Aktual	Kriteria
1	D3	3	180	225	80%	Baik
2	SI	18	1155	1350	85,56%	Sangat Baik
3	S2	9	546	675	80,89%	Baik
TOTAL		30	1881	2250	83,6%	Sangat Baik

Sumber : Data primer yang telah diolah (2010)

- Skor ideal D3 = Jumlah Responden X Nilai Tertnggi X Jumlah Pertanyaan

Skor ideal = 3 x 5 x 15

= 225

$$\% \text{ Skor Aktual D3} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual D3} = \frac{180}{225} \text{ X } 100\%$$

= 80%

- Responden SI yang menjawab variabel X

Skor ideal = 18 x 5 x 15

= 1350

$$\% \text{ Skor Aktual SI} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual SI} = \frac{1155}{1350} \text{X } 100\%$$

= 85,56%

- Responden S2 yang menjawab variabel X

Skor ideal = 9 x 5x 15

= 675

$$\% \text{ Skor Aktual S2} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual S2} = \frac{546}{675} \text{ X } 100\%$$

= 80,89%

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Pengawasan Fungsional pada Inspektorat kota Bandung yang terpilih sebagai responden. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang pendidikan D3 memilih dengan skor sebesar 80%, responden yang pendidikan SI sebesar 85,56% dan responden yang pendidikan S2 sebesar 80,89% jadi dapat disimpulkan bahwa responden pendidikan SI lebih banyak di bandingkan D3 dan

S2 karena untuk menjalankan tata kelola lembaga Inspektorat yang baik di harapkan memiliki pengetahuan yang lebih luas namun untuk jenjang S2 dinilai masih kurang dibandingkan SI

Tabel 4.14
Distribusi Jawaban Responden D3 Mengenai Keuangan Daerah (Y) BerdasarkanPendidikan Terakhir Pada Inspektorat Kota Bandung

Respon	Bobot	F	%	Skor aktual
Sangat setuju	5	13	35,56%	65
Setuju	4	15	37,78%	60
Ragu –ragu	3	13	26,67%	39
Tidak setuju	2	4	0%	8
Sangat Tidak setuju	1	0	0%	0
TOTAL		45	100%	172

Sumber : Data primer yang telah diolah (2010)

Total Frekuensi = Jumlah Responden X Jumlah Pertanyaan

= 3X15

= 45

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden SI Mengenai Keuangan Daerah (Y) BerdasarkanPendidikan Terakhir Pada Inspektorat Kota Bandung

Respon	Bobot	F	%	Skor aktual
Sangat setuju	5	145	38,89%	725
Setuju	4	61	37,41%	244
Ragu –ragu	3	49	19,26%	147
Tidak setuju	2	15	4,44%	30

Sangat Tidak setuju	1	0	0%	0
TOTAL		270	100%	1146

Sumber : Data primer yang telah diolah (2010)

Total Frekuensi = Jumlah Responden X Jumlah Pertanyaan

= 18 X 15

= 270

Tabel 4.16
Distribusi Jawaban Responden S2 Mengenai Keuangan Daerah (Y)
BerdasarkanPendidikan Terakhir Pada Inspektorat Kota Bandung

Respon	Bobot	F	%	Skor aktual
Sangat setuju	5	56	56,3%	280
Setuju	4	47	27,41%	188
Ragu –ragu	3	32	16,3%	96
Tidak setuju	2	0	0%	0
Sangat Tidak setuju	1	0	0%	0
TOTAL		135	100%	564

Sumber : Data primer yang telah diolah (2010)

Total Frekuensi = Jumlah Responden X Jumlah Pertanyaan

= 9 X 15

= 135

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Berdasarkan Pendidikan mengenai Keuangan Daerah (Y) Pada Inspektorat Kota Bandung

No	Pendidikan	F	Skor aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	D3	3	172	225	76,44%	Baik
2	SI	18	1146	1350	84,89%	Sangat Baik
3	S2	9	564	675	83,56%	Baik
TOTAL		30	1882	2250	83,64%	Baik

Sumber : Data primer yang telah diolah (2010)

- Skor ideal D3 = Jumlah Responden X Nilai Tertnggi X Jumlah Pertanyaan

Skor ideal = 3 x 5 x 15

= 225

$$\% \text{ Skor Aktual D3} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual D3} = \frac{172}{225} \text{ X } 100\%$$

= 76,44%

- Responden SI yang menjawab variabel X

Skor ideal = 18 x 5 x 15

= 1350

$$\% \text{ Skor Aktual SI} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual SI} = \frac{1146}{1350} \text{X } 100\%$$

$$= 84{,}89\%$$

- Responden S2 yang menjawab variabel X

$$\text{Skor ideal} = 9 \text{ x } 5 \text{ x } 15$$

$$= 675$$

$$\% \text{ Skor Aktual S2} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual S2} = \frac{564}{675} \text{X } 100\%$$

$$= 83{,}56\%$$

Berdasarkan Tabel diatas penulis dapat mengetahui bahwa karyawan-karyawati Inspetorat Kota Bandung dari Bagian Keuangan. Data yang diperoleh melalui kuesioner menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan D3 sebesar 76,44% berarti pada variabel Y ini Baik sedangkan responden yang berpendidikan SI sebesar 84,89% berarti pada variabel Y ini Sangat Baik dan responden yang berpendidikan S2 sebesar 83,56% berarti pada variabel Y ini Baik. jadi dapat disimpulkan bahwa responden pendidikan SI lebih banyak di bandingkan D3 dan S2 karena untuk menjalankan keuangan daerah di lembaga Inspektorat di

harapkan orang yang memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mampu menjalankan mengenai keuangan daerah namun untuk jenjang S2 dinilai masih kurang dibandingkan SI dan perlu penambahan untuk lembaga ini.

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Mengenai Analisis Pengawasan Fungsional terhadap Keuangan Daerah pada Inspektorat Kota Bandung

No	Variabel	F	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengawasan Fungsional (X)	30	1881	2250	83,6%	Baik
2	Keuangan Daerah (Y)	30	1882	2250	83,64%	Baik

Berdasarkan Tabel Pada tabel diatas Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden sebanyak 30 responden berdasarkan pendidikan terakhir menunjukan bahwa mengenai pengawasan fungsional sebesar 83,6% dikategorikan berjalan baik, dan mengenai keuangan daerah sebesar 83,64% dikategorikan berjalan baik.

4.2 Pembahasan

Pada bab ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket pada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui studi pustaka untuk melengkapi data utama. Angket terdiri dari 30 pertanyaan dengan perincian 15

pertanyaan mengenai pengawasan fungsional dan 15 pertanyaan tentang efektivitas keuangan daerah.

Jumlah responden dalam penelitian ini 30 orang, yang menjadi subyek penelitian adalah staff administrasi&umum sebanyak 15 orang dan staff keuangan 15 orang. Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner.

Pembahasan merupakan perhitungan serta analisis dari data-data yang diperoleh dari perusahaan. Data-data yang terkumpul merupakan data primer karena diperoleh langsung dari tangan pertama melalui instrumen penelitian atau kuesioner dan sekunder.

4.2.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan sebagai alat untuk mengetahui kenyataan yang terjadi mengenai variabel yang sedang diteliti. Hasil tanggapan responden akan diuraikan melalui tabel frekuensi dan persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 30 orang responden yang merupakan staff Inspektorat kota Bandung.

4.2.1.1 Analisis Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 30 orang karyawan Inspektorat Kota Bandung yang menjadi responden tentang pengawasan

fungsional. Skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut.

$$\%\,\text{skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan
b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertingi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertingi.

Analisis kualitatif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel pengawasan fungsional. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pengawasan fungsional pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung berdasarkan indikator.

1. Pengawasan

Guna mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari keempat butir pernyataan mengenai pengawasan yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.19
Jawaban Responden Mengenai staff Inspektorat melakukan pengawasan / Pemeriksaan pada setiap SKPD secara berkala

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	20	66,7%	100
Setuju	4	10	33,3%	40
Netral	3	0	0,0%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**30**	**100%**	**140**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{140}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 93{,}33\ \%$$

Pada umumnya responden sependapat bahwa staff inspektorat melakukan pengawasan pada setiap SKPD secara berkala. Persentase skor tanggapan responden sebesar 93,33% termasuk dalam kategori tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya staff administrasi & umum melakukan pengawasan / pemeriksaan pada setiap SKPD.

Tabel 4.20
Distribusi Jawaban Responden Mengenai staff yang tidak melakukan *stock opname*

Respon	**Bobot**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	83,3%	125
Setuju	4	16,7%	20
Netral	3	0%	0
Tidak setuju	2	0%	0
Sangat tidak setuju	1	0%	0
Total		**100%**	**145**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{145}{150} \text{ X } 100\%$$

= 97,67%

Sebagian besar responden sependapat bahwa staff administrasi & umum yang tidak melakukan stock *opname* dikatakan tidak mematuhi peraturan dan harus di berikan sanksi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 97,67% termasuk dalam kategori tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Staff SKPD yang tidak melakukan *stock opname* sudah dikatakan tidak mematuhi peraturan dan perlu mendapatkan sanksi. Hal tersebut terjadi karena didalam menjalankan tugasnya Staff SKPD mengalami kendala dalam pembuatan *Stock opname* salah satunya karena waktu yang kurang dan tenaga ahli yang tidak memadai.

Tabel 4.21
Distribusi Jawaban Responden Mengenai antara peraturan / program/ rencana dengan kondisi yang ada

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	22	73,3%	110
Setuju	4	8	26,7%	32
Netral	3	0	0%	0
Tidak setuju	2	0	0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0%	0
Total		**30**	**100%**	**142**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{142}{150} \text{ X } 100\%$$

= 94,67 %

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum selalu membandingkan antara peraturan/program/rencana dengan kondisi yang ada. Persentase skor tanggapan responden sebesar 94,67% termasuk dalam kategori tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota Bandung perlu membandingkan antara peraturan / program / rencana dengan kondisi yang ada agar menghidari kesalahan.

Tabel 4.22
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Temuan oleh BPK kendaraan dinas masih dikuasai mantan pegawai yang sudah purna bakti

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	23	73,3%	115
Setuju	4	6	26,7%	24
Netral	3	1	0%	3
Tidak setuju	2	0	0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0%	0
Total		**30**	**100%**	**142**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{142}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 94{,}67\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum bahwa masih ada kendaraan dinas masih dimiliki oleh pegawai yang sudah purna bakti hal ini perlu ditindak lnjuti oleh Inspektorat Persentase skor tanggapan responden sebesar 94,67% termasuk dalam kategori tinggi, Tetapi masih ada responden yang bersikap netral terhadap penyarataan tersebut mencerminkan

bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota Bandung perlu menindak lanjuti masalah tersebut namun pada kenyataannya staff Inspektorat mengalami hambatan salah satunya yaitu ada sebagian staff yang sudah Purna bakti keberadaanya tidak diketahui lagi

Tabel 4.23
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengawasan

No	Ukuran	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Jadwal pada saat pengawasan	285	300	95,0%	Sangat baik
2	Program kerja	142	150	94,7%	Sangat baik
3	Pengumpulan & penelaahan Informasi	142	150	94,7%	Sangat baik
	Total	569	600	94,83%	**Sangat baik**

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap keempat butir pernyataan yang diajukan mengenai pengawasan termasuk dalam kategori sangat baik. Data ini menunjukkan bahwa pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung sudah dilakukan dengan sangat baik yaitu dengan hasil 94,83%.

2. Pengkajian

Guna mengetahui bagaimana pengkajian yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden.

Tabel 4.24
Distribusi Jawaban Responden Mengenai dokumen sebagai barang bukti

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	23	76,7%	115
Setuju	4	5	16,7%	20
Netral	3	0	0,0%	0

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Tidak setuju	2	2	6,7%	4
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**139**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{139}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 92{,}67\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum pada saat pengkajian memerlukan dokumen pelengkap sebagai barang bukti Persentase skor tanggapan responden sebesar 92,67% termasuk dalam kategori tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota Bandung memerlukan barang bukti sebagai pelengkap agar dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari

Sesuai dengan teori yang menyebutkan dokumen sebagai sumber informasi atau laporan harus dinyatakan dengan jelas, pernyataan pengkajian meliputi informasi tentang kelengkapan cakupan laporan atas pelayanan dan program-program utama/penting dari entitas , maksud dari kriteia ini adalah untuk menginformasikan kepada pemakai tentang maksud dari dokumen/laporan tersebut, dan untuk mengenditifikasi program-program dan pelayanan yang tercakup dalam laporan kinerja tersebut.

Tabel 4.25
Distribusi Jawaban Responden Mengenai kurangnya tenaga ahli

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	21	70,0%	105
Setuju	4	5	16,7%	20
Netral	3	4	13,3%	12
Tidak setuju	2	0	0,0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**137**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{137}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 91{,}33\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum pada saat pengkajian mendapat hambatan yaitu kurangnya tenaga ahli pada saat melakukan *stock opname* Persentase skor tanggapan responden sebesar 91,33% termasuk dalam kategori tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota Bandung memerlukan tambahan staff tenaga ahli sehingga agar dapat bekerjaa dengan optimal.

Tabel 4.26
Distribusi Jawaban Responden Mengenai keterbatasan waktu

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	4	13,3%	20
Setuju	4	6	20,0%	24
Netral	3	19	63,3%	57
Tidak setuju	2	1	3,3%	2
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Total		**30**	**100%**	**103**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{103}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 68.67\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum pada saat pengkajian mendapat hambatan yaitu keterbatasan waktu pada saat melakukan stock opname Persentase skor tanggapan responden sebesar 68,67% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota Bandung keterbatasan waktu bukanlah alasan buat setiap SKPD tidak melakukan *Stock opname*.

Tabel 4.27
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengkajian

No	Ukuran	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Dokumen yang diperlukan	139	150	92,67%	Sangat baik
2	Jumlah Tenaga ahli	240	300	80,0%	Baik
	Total	379	450	84,22%	**Sangat baik**

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai pengkajian termasuk dalam kategori sangat baik. Data ini

menunjukkan bahwa pengkajian pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengawasan fungsional sudah dilakukan dengan sangat baik namun pada ukuran jumlah tenaga ahli kriterianya baik di bandingkan pada ukuran dokumen yang diperlukan ini di sebabkan jumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dinilai kurang yang menyebabkan pada saat pelaporan stock opname tidak sesuai dengan waktu dikarenakan kurangnya tenaga ahli dibidangnya.

3. Pengusutan

Guna mengetahui bagaimana pengusutan yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengawasan fungsional, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir pernyataan mengenai pengusutan yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.28
Distribusi Jawaban Responden Mengenai SKPD yang tidak melakukan tindak lanjut

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	21	70,0%	105
Setuju	4	7	23,3%	28
Netral	3	1	3,3%	3
Tidak setuju	2	1	3,3%	2
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**138**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan } = \frac{138}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 92\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum pada saat pengkajian ditemukannya beberapa SKPD yang tidak melakukan tindak lanjut pada saat pemeriksaan oleh inspektorat Persentase skor tanggapan responden sebesar 92% termasuk dalam kategori tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota Bandung pada saat terdapat beberapa temuan terhadap SKPD yang tidak melakukan tindak lanjut.

Tabel 4.29
Distribusi Jawaban Responden Mengenai penyelesaian masalah perlu Mencari bahan sebagai bukti agar dapat ditindak lanjut

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	18	60,0%	90
Setuju	4	10	33,3%	40
Netral	3	1	3,3%	3
Tidak setuju	2	1	3,3%	2
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**135**

$$\% \text{ Skor tanggapan } = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan } = \frac{135}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 90\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum pada saat pengkajianmemerlukan bahan bukti agar dapat ditindak lanjuti . Persentase skor tanggapan responden sebesar 90% termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 4.30
Distribusi Jawaban Responden Mengenai pengambilan secara paksa yang dilakukan Inspektorat setelah diberikan sanksi sebanyak 3X

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	14	46,7%	70
Setuju	4	12	40,0%	48
Netral	3	3	10,0%	9
Tidak setuju	2	1	3,3%	2
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**129**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{129}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 86\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum pada saat pengkajian ditemukannya beberapa kendaraan dinas milik pemerintah yang masih dikuasai oleh pegawai purna bakt. Persentase skor tanggapan responden sebesar 86% termasuk dalam kategori tinggi, namun masih ada yang berpendapat netral mencerminkan bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota yang sudah purna bakti akan akan diberikan sanksi setelah mendapatkan peringatan jika masih ada kendaraan milik pemerintah yang masih dikuasai oleh pegawai tersebut.

Tabel 4.31
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengusutan

No	Ukuran	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Mencari bahan bukti	402	450	89,3%	Sangat baik
	Total	402	450	89,3%	**Sangat Baik**

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai pengusutan termasuk dalam kategori sangat baik. Data ini menunjukkan bahwa pengusutan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengawasan fungsional sudah dilakukan dengan sangat baik.

4. Penilaian

Guna mengetahui bagaimana penilaian yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengawasan fungsional, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari kelima butir pernyataan mengenai penilaian yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut

Tabel 4.32
Distribusi Jawaban Responden Mengenai sulitnya mendapatkan sertifikat JFA

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	24	80,0%	120
Setuju	4	4	13,3%	16
Netral	3	1	3,3%	3
Tidak setuju	2	1	3,3%	2
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**141**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{141}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 94\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum pada saat penilaian kesulitan mendapatkan sertifikat JFA. Persentase skor tanggapan responden sebesar 94% termasuk dalam kategori tinggi, namun masih ada yang berpendapat netral mencerminkan bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota Bandung mengalami kesulitan untuk mendapatkan sertifikat JFA.

Tabel 4.33
Distribusi Jawaban Responden Mengenai staff pemeriksa memiliki pendidikan terakhir SI dan bersertifikat JFA

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	21	70,0%	105
Setuju	4	7	23,3%	28
Netral	3	0	0,0%	0
Tidak setuju	2	2	6,7%	4
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**137**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{137}{150} \text{ X } 100\%$$

= 91,33 %

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum pada saat penilaian harus memiliki pendidikan minimal SI dan memiliki sertifikat JFA. Persentase skor tanggapan responden sebesar 91,33% termasuk dalam kategori tinggi, namun masih ada yang berpendapat tidak setuju mencerminkan bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota Bandung mengalami kesulitan untuk mendapatkan sertifikat JFA.

Tabel 4.34
Distribusi Jawaban Responden Mengenai staff yang memiliki keahlian di bidang akuntansi

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	3	10,0%	15
Setuju	4	6	20,0%	24
Netral	3	4	13,3%	12
Tidak setuju	2	15	50,0%	30
Sangat tidak setuju	1	2	6,7%	2
Total		**30**	**100%**	**83**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{83}{150} \text{ X } 100\%$$

= 55,33 %

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum pada saat penilaian belum memiliki keahlian di bidang akuntansi yang mencukupi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 55,33% termasuk dalam kategori

cukup, namun masih ada yang berpendapat setuju mencerminkan bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota Bandung memiliki keahlian dibidang akuntansi yang belum mencukupi.

Tabel 4.35
Distribusi Jawaban Responden Mengenai evaluasi kinerja pegawai

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	19	10,0%	95
Setuju	4	6	20,0%	24
Netral	3	2	13,3%	6
Tidak setuju	2	3	50,0%	6
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**131**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{131}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 87{,}33\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum pada saat penilaian pemeriksaan secara berkala dapat mengevaluasi seluruh pegawai. Persentase skor tanggapan responden sebesar 87,33% termasuk dalam kategori tinggi, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota Bandung perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala agar dapat mengurangi kecurangan yang cenderung melanggar peraturan.

Tabel 4.36
Distribusi Jawaban Responden Mengenai kualitas pendidikan dan keahlian

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	18	60.0%	90
Setuju	4	11	36,7%	44
Netral	3	0	0,0%	0
Tidak setuju	2	1	3,3%	2
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**136**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{136}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 90{,}67\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staff Administrasi & umum pada saat penilaian Kualitas pendidikan dan keahlian yang dimiliki dapat menetapakan tingkat keberhasilan di pemkot bandung . Persentase skor tanggapan responden sebesar 90,67% termasuk dalam kategori tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya staff Administrasi & umum pada Inspektorat kota Bandung mengharapkan Kualitas pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh staff Inspektorat dapat menetapakan tingkat keberhasilan dan pelaksanaan pembangunan di Inspektorat kota Bandung

Tabel 4.37
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Penilaian

No	Ukuran	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Tingkat Keberhasilan	628	750	83,7%	Baik
	Total	628	750	83,7%	**Baik**

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kelima butir pernyataan yang diajukan mengenai penilaian termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa penilaian pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengawasan fungsional sudah dilakukan dengan baik namun untuk staff yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dinilai kurang di Inspektorat kota Bandung.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran pengawasan fungsional secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas keempat indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.38
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Pengawasan Fungsional

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	**Pengawasan**	**569**	**600**	**94.8%**	**Sangat baik**
2	**Pengkajian**	**379**	**450**	**84.2%**	**Sangat baik**
3	**Pengusutan**	**402**	**450**	**89.3%**	**Sangat baik**
4	**Penilaian**	**628**	**750**	**83.7%**	**Baik**
	Total	**1978**	**2250**	**87.9%**	**Sangat baik**

1. Skor aktual = Jumlah ∑ skor
   = 569+379+402+628
   =1978

2. Skor Ideal = jumlah responden X Bobot tertinggi X Jumlah soal

   = 30 X 5 X 15
   = 2250

3. % Skor Aktual $= \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$

   $= \frac{1978}{2250} \text{ X } 100\%$

   = 87,9%

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung sudah sangat baik. Hal ini didukung oleh pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung yang sudah dilakukan dengan sangat baik, pengkajian juga sudah sangat baik dan pengusutan yang sudah dilakukan dengan sangat baik. Hanya saja penilaian pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung masih dalam kriteria baik disebabkan oleh kurang mencukupinya tenaga kerja yang memiliki keahlian dibidang akuntansi di inspektorat Bandung.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran pengawasan fungsional secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dari mulai ukuran, indikator , skor aktual persentase skor aktual dan kriteria dari masing – masing pertanyaan dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut

Tabel 4.39
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Pengawasan Fungsional

No	Ukuran	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Jadwal pada saat pengawasan		140	150	93.3%	Sangat baik
2			145	150	96.7%	Sangat baik

No	Ukuran	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
3	Program kerja		142	150	94.7%	Sangat baik
4	Pengumpulan &penelaahan Informasi		142	150	94.7%	Sangat baik
		Pengawasan	**569**	**600**	**94.8%**	**Sangat baik**
5	Dokumen yang diperlukan		139	150	92.7%	Sangat baik
6	Jumlah tenaga ahli		137	150	91.3%	Sangat baik
7			103	150	68.7%	Sangat baik
		Pengkajian	**379**	**450**	**84.2%**	**Sangat baik**
8	Mencari bahan bukti		138	150	92.0%	Sangat baik
9			135	150	90.0%	Sangat baik
10			129	150	86.0%	Sangat baik
		Pengusutan	**402**	**450**	**89.3%**	**Sangat baik**
11	Tingkat keberhasilan		141	150	94.0%	Sangat baik
12			137	150	91.3%	Sangat baik
13			83	150	55.3%	Cukup
14			131	150	87.3%	Sangat baik
15			136	150	90.7%	Sangat baik
		Penilaian	**628**	**750**	**83.7%**	**Baik**
		Total	**1978**	**2250**	**87.9%**	**Sangat baik**

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung sudah sangat baik. Hal ini didukung oleh pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung yang sudah dilakukan dengan sangat baik, pengkajian juga sudah sangat baik dan pengusutan yang sudah dilakukan dengan sangat baik. Hanya saja penilaian pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung masih dalam

kriteria baik disebabkan oleh kurang mencukupinya tenaga kerja yang memiliki keahlian dibidang akuntansi di Inspektorat kota Bandung sehingga banyak kendala yang dialami salah satunya yaitu tidak tepat waktu dalam pelaporan *stock opname* .

4.2.1.2 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 30 orang karyawan Inspetorat Kota Bandung yang menjadi responden tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sama halnya pada pengawasan fungsional, skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal. Analisis dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan indikator:

1. Efisiensi

Guna mengetahui bagaimana efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir pernyataan mengenai efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.40
Distribusi Jawaban Responden Mengenai kualitas pendidikan dan keahlian

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	9	30.0%	45
Setuju	4	16	53,3%	64
Netral	3	1	3,3%	3
Tidak setuju	2	4	13,3%	8

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**120**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{120}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staf keuangana. Sumber daya manusia sudah berjalan efisien. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori tinggi, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya keuangana pada Inspektorat kota Bandung mengharapkan sumber daya manusia berjalan secara efisen dalam mendukung keuangan daerah

Tabel 4.41
Distribusi Jawaban Responden Mengenai faktor tidak dipenuhinya laporan keuangan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	18	60,0%	90
Setuju	4	4	13,3%	16
Netral	3	5	16,7%	15
Tidak setuju	2	3	10,0%	6
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**127**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{127}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 84{,}67\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staf keuangan. tenaga pembukuan akuntan merupakan faktor tidak dipenuhinya batas waktu penyusunan laporan keuangan ke BPK. Persentase skor tanggapan responden sebesar 84,67% termasuk dalam kategori tinggi, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya keuangana pada Inspektorat kota Bandung bahwa seorang tenaga pembukuan sangat di butuhkan agar dapat menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.

Tabel 4.42
Distribusi Jawaban Responden Mengenai faktor terbatasnya Tenaga Informasi

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	6	20,0%	30
Setuju	4	5	16,7%	20
Netral	3	19	63,3%	57
Tidak setuju	2	0	0,0%	6
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**107**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{107}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 71{,}33\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staf keuangan. Terbatasnya Teknologi Informasi merupakan faktor penyebab tidak dipenuhinya batas penyusunan penyampaian keuangan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 71,33% termasuk dalam kategori tinggi, namun masih banyak yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung mengalami keterbatasan tenaga informasi sehingga menyebabkan tidak dapat dipenuhinya batas penyusunan penyampaian keuangana ke BPK untuk diperiksa.

Tabel 4.43
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai indikator Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Inspektorat Kota Bandung

No	Ukuran	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Keuangan daerah ditata sedemikian rupa agar berjalan efisien	354	450	78,7%	Baik
	Total	354	450	78,7%	**Baik**

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai efisiensi pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam kategori tinggi. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung sudah dilakukan dengan efisien

2. Ekonomis

Guna mengetahui bagaimana keekonomisasn pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari butir pernyataan mengenai keekonomisasn pengelolaan keuangan daerah yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.44
Distribusi Jawaban Responden Mengenai penggunaan keuangan daerah di gunakan dengan biaya serendah – rendahnya

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	4	13,3%	20
Setuju	4	4	13,3%	16
Netral	3	22	73,3%	66
Tidak setuju	2	0	0,0%	6
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**96**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{96}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 64\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa staf keuangan didalam penggunaan keuanganan agar dapat menggunakan secara ekonomis sesuai dengan tujuan pemerintah. Persentase skor tanggapan responden sebesar 64% termasuk dalam kategori cukup baik, namun masih banyak yang berpendapat netral,

mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung harus bisa mempergunakan keuangan dengan ekonomis.

Tabel 4.45
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai indikator Ekonomi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Inspektorat kota Bandung

No	Ukuran	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Perolehan kualitas dan kuantitas yang maksimal	102	150	68%	Cukup Baik
	Total	102	150	68%	**Cukup Baik**

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap butir pernyataan yang diajukan mengenai keekonomisasn pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam kategori cukup baik. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung sudah dilakukan dengan cukup ekonomis.

3. Efektif

Guna mengetahui bagaimana keefektifan pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari kedua butir pernyataan mengenai keefektifan pengelolaan keuangan daerah yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.46
Distribusi Jawaban Responden Mengenai penyusunan LKPD berjalan efektif

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	8	26,7%	40
Setuju	4	19	63,3%	76

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Netral	3	3	10,0%	9
Tidak setuju	2	0	0,0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**125**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{125}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 83{,}33\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa Didalam penyusunan LKPD sudah berjalan secar efektif. Persentase skor tanggapan responden sebesar 83,33% termasuk dalam kategori baik, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung Didalam penyusunan LKPD sudah berjalan secar efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.47
Distribusi Jawaban Responden Mengenai pengawasan sebagai unsur mencegah penyelewengan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	4	13,3%	20
Setuju	4	22	73,3%	88
Netral	3	2	6,7%	6
Tidak setuju	2	2	6,7%	4
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**118**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{118}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 78{,}67\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa Pengawasan sebagai unsur penting dalam mempertanggung jawabkan keuangan daerah, juga untuk mencegah penyelewengan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 78,67% termasuk dalam kategori baik, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung pengawasan sangat perlu di laksanakan.

Tabel 4.48
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai indikator Efektif Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Inspektorat kota Bandung

No	Ukuran	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Unsur keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur	125	150	83,33%	Baik
2	Memperkecil kesempatan untuk berbuat curang	118	150	78,67%	Cukup Baik
	Total	243	300	81,0%	**Baik**

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai keefektifan pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota

Bandung sudah dilakukan dengan efektif namun pada butir pernyataan pengawasan sebagai unsur mencegah penyelewangan termasuk kriteria cukup.

4. Transparan

Guna mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir pernyataan mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.49
Distribusi Jawaban Responden Mengenai opini yang diberikan oleh BPK

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	4	13,3%	20
Setuju	4	21	70,0%	84
Netral	3	3	10,0%	9
Tidak setuju	2	2	6,7%	4
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**117**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{117}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 78\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa Opini yang diberikan oleh BPK disebabkan karena transparansi dan akuntabilitas semakin memburuk. Persentase skor tanggapan responden sebesar 78% termasuk dalam kategori baik, namun

masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar dapat mengurangi opini yang tidak diharapkan yang di berikan oleh BPK.

Tabel 4.50
Distribusi Jawaban Responden Mengenai keterbukaan dalam memberikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	4	13,3%	20
Setuju	4	6	20,0%	24
Netral	3	20	66,7%	60
Tidak setuju	2	0	0,0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 69{,}3\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa LKPD harus memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Persentase skor tanggapan responden sebesar 69,3% termasuk dalam kategori baik, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung harus terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat

Tabel 4.51
Distribusi Jawaban Responden Mengenai semua LKPD
dapat mempertanggungjawabkan secara transparan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	19	63,3%	95
Setuju	4	8	26,7%	32
Netral	3	3	10,0%	9
Tidak setuju	2	0	0,0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**136**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{136}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 90{,}67\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa Semua LKPD dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 90,67% termasuk dalam kategori sangat baik, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan.

Tabel 4.52
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah(Y) pada Inspektorat kota Bandung

No	Ukuran	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Masyarakat dapat mengetahui Informasi laporan Keuangan daerah	357	450	79,3%	Baik

No	Ukuran	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
	Total	357	450	79,3%	**Baik**

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung sudah dilakukan secara transparan namun untuk untuk pertanyaan ketebukaan memberikan informasi LKPD kepada masyarakat masih dinilai tipis dan perlu peningkatan lagi agar lebih terbuka kepada masyarakat.

5. Tanggungjawab

Guna mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari keempat butir pernyataan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.53
Distribusi Jawaban Responden Mengenai ketidak cocokan pencatatan yang menimbulkan opini wajar dengan syarat

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	14	46,7%	70
Setuju	4	14	46,7%	56
Netral	3	2	6.7%	6
Tidak setuju	2	0	0,0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**132**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{132}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 88\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa Timbulnya ketidak cocokan pencatatan dapat menimbulkan opini wajar dengan syarat dan harus dipertanggung jawabkan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 88% termasuk dalam kategori sangat baik, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung harus teliti pada saat pencatatan agar tidak menimbulkan opini wajar dengan syarat dan harus mempertanggungjawabkan.

Tabel 4.54
Distribusi Jawaban Responden Mengenai pengawasan sebagai unsur penting dalam mempertanggung jawabkan keuangan daerah

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	16	53,3%	80
Setuju	4	11	36,7%	44
Netral	3	3	10,0%	9
Tidak setuju	2	0	0,0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**133**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{133}{150} \text{ X } 100\%$$

= 88,67 %

Mayoritas responden sependapat bahwa pengawasan sebagai unsur penting dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Persentase skor tanggapan responden sebesar 88,67% termasuk dalam kategori sangat baik, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung bahwa pengawasan sangat di perlukan dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

Tabel 4.55
Distribusi Jawaban Responden Mengenai pengawasan sebagai tata cara yang efektif dan tepat penggunaannya

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	18	60%	90
Setuju	4	10	33,3%	40
Netral	3	2	6,7%	6
Tidak setuju	2	0	0,0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**136**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{136}{150} \text{ X } 100\%$$

= 90,67 %

Mayoritas responden sependapat bahwa pengawasan sebagai unsur penting dan efektif dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Persentase skor tanggapan responden sebesar 90,67% termasuk dalam kategori sangat baik, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya

staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung bahwa pengawasan sangat di perlukan dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah serta merupakan tata cara yang efektif untuk memastikan semua pendapatan benar – benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

Tabel 4.56
Distribusi Jawaban Responden Mengenai di perlukan pengawas yang jujur guna memperkecil kecurangan

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	21	70%	105
Setuju	4	7	23,3%	28
Netral	3	2	6,7%	6
Tidak setuju	2	0	0,0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**139**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{139}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 92{,}67\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa diperlukan pengawasanyang jujur dan bertanggungjawab guna memperkecil kesempatan berbuat curang. Persentase skor tanggapan responden sebesar 92,67% termasuk dalam kategori sangat baik, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung bahwa pengawas yang jujur dan bertanggungjawab sangat diperlukan.

Tabel 4.57
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai indikator Bertanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Inspektorat kota Bandung

No	Ukuran	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Unsur dari tanggung jawab yaitu keabsahan dan serta tata cara pengawasan yang efektif	540	600	90%	Sangat Baik
	Total	540	600	90%	**Sangat Baik**

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap keempat butir pernyataan yang diajukan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam kategori sangat tinggi. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung sangat bisa dipertanggungjawabkan.

6. Keadilan

Guna mengetahui bagaimana pemenuhan rasa keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari kedua butir pernyataan mengenai pemenuhan rasa keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.58
Distribusi Jawaban Responden Mengenai keadilan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor aktual
Sangat setuju	5	22	73,3%	110
Setuju	4	5	16,7%	20
Netral	3	3	10%	9
Tidak setuju	2	0	0,0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**139**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{139}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 92{,}67\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa didalam pelaksanaan Efektivitas keuangan daerah perlu adanya keadilan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 92,67% termasuk dalam kategori sangat baik, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung didalam pelaksanaan Efektivitas keuangan daerah perlu adanya keadilan

Tabel 4.59
Distribusi Jawaban Responden Mengenai keuangan daerah
sudah seimbnag dengan distribusi

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor aktual**
Sangat setuju	5	23	76,7%	115
Setuju	4	6	20%	24
Netral	3	1	3,3%	3
Tidak setuju	2	0	0,0%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.0%	0
Total		**30**	**100%**	**142**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{142}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 94{,}67\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa didalam pelaksanaan Efektivitas keuangan daerah sudah seimbang dengan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 94,67% termasuk dalam kategori sangat baik, namun masih ada yang berpendapat netral, mencerminkan bahwa pada umumnya staf keuangana pada Inspektorat kota Bandung didalam pelaksanaan Efektivitas keuangan daerah sudah seimbang dengan distribusi kewenangan dan pendanaanya.

Tabel 4.60
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai indikator Keadilan Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Inspektorat kota Bandung

No	Ukuran	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Keseimbangan distribusi antara kewenangan dengan pendanaannya	281	300	93,7%	Sangat Baik
	Total	281	300	93,7%	**Sangat Baik**

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai pemenuhan rasa keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung sangat memenuhi rasa keadilan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas keenam indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.61
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Efektivitas Pengelolaan Kuangan (Y) pada Inspektorat kota Bandung

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	**Efisiensi**	**354**	**450**	**78.7%**	**Baik**
2	**Ekonomis**	**102**	**150**	**68.0%**	**Cukup**
3	**Efektif**	**243**	**300**	**81.0%**	**Baik**
4	**Transparansi**	**357**	**450**	**79.3%**	**Baik**
5	**Bertanggungjawab**	**540**	**600**	**90.0%**	**Sangat Baik**
6	**Keadilan**	**281**	**300**	**93.7%**	**Sangat Baik**
	Total	**1877**	**2250**	**83.4%**	**Baik**

4. Skor aktual = Jumlah ∑ skor
   = 354+102+243+357+540+281
   =1877

5. Skor Ideal = jumlah responden X Bobot tertinggi X Jumlah soal
   = 30 X 5 X 15
   = 2250

6. % Skor Aktual $= \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$

$= \frac{1877}{2250} \text{ X } 100\%$

= 83,4%

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung sudah baik. Hal ini didukung oleh pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung yang sudah dilakukan dengan efisien, efektif, transparan dengan pertanggungjawaban dan pemenuhan rasa keadilan yang sangat tinggi. Hanya saja nilai keekonomisan melalui penggunaan keuangan daerah dengan biaya serendah – rendahnya belum bisa dilaksanakan karena dengan biaya yang ekonomis tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal.

Tabel 4.62
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel
Efektivitas Pengelolaan Kuangan

No	Ukuran	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
16	Keuangan daerah ditata sedemikian rupa agar berjalan efisien		120	150	80.0%	Baik
17			127	150	84.7%	Sangat Baik
18			107	150	71.3%	Baik
		Efisiensi	**354**	**450**	**78.7%**	**Baik**
19	Perolehan kualitas dan kuantitas yang maksimal		**102**	**150**	**68.0%**	**Cukup Baik**
		Keekonomisan	**102**	**150**	**68.0%**	**Cukup Baik**
20	Unsur keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur		125	150	83.3%	Baik
21	Memperkecil kesempatan untuk berbuat curang		118	150	78.7%	Baik
		Keefektifan	**243**	**300**	**81.0%**	**Baik**
22	Masyarakat dapat mengetahui laporan Keuangan daerah		117	150	78.0%	Baik
23			104	150	69.3%	Baik
24			136	150	90.7%	Sangat Baik
		Transparansi	**357**	**450**	**79.3%**	**Baik**
25	Unsur dari tanggungjawab byaitu keabsahan dan serta tata usaha pengawasan yang		132	150	88.0%	Sangat Baik
26			133	150	88.7%	Sangat Baik
27			136	150	90.7%	Sangat

No	Ukuran	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
	efektif					Baik
28			139	150	92.7%	Sangat Baik
		Bertanggungjawab	**540**	**600**	**90.0%**	**Sangat Baik**
29	Keseimbangan distribusi antara kewenangan dengan pendanaannya		139	150	92.7%	Sangat Baik
30			142	150	94.7%	Sangat Baik
		Keadilan	**281**	**300**	**93.7%**	**Sangat Baik**
		Total	**1877**	**2250**	**83.4%**	**Baik**

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung sudah Baik. Hal ini didukung oleh pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung yang sudah dilakukan dengan efisien, efektif, transparan dengan pertanggungjawaban dan pemenuhan rasa keadilan yang sangat Baik. Hanya saja nilai keekonomisan melalui penggunaan keuangan daerah dengan biaya serendah – rendahnya belum bisa dilaksanakan karena dengan biaya yang ekonomis tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal.

4.2.2 Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif digunakan untuk mebuktikan hipotesis dalam penelitian. Pengujian hipotesis dalam panalitian kali ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh Pengawasan Fungsional (variabel *independent*) terhadap Efektivitas Keuangan Daerah (variabel *dependent*).

4.2.2.1 Analisis Atas Pengawasan Fungsional (X) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Pada bagian ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam bab II adalah adanya pengaruh dari pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\beta = 0$ Pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung

Ha: $\beta \neq 0$ Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung

Penolakan dan penerimaan Ho didasarkan pada nilai statistik uji t dan nilai signifikansi. Apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (2,048) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Data variabel X (pengawasan fungsional) dan variabel Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regressi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.63
Rekap Data Variabel Pengawasan Fungsional (X) dan Variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Responden	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	49,874	31,999	2487,416	1023,936	1595,918

Responden	X	Y	X^2	Y^2	XY
2	52,140	46,397	2718,580	2152,682	2419,140
3	49,280	40,335	2428,518	1626,912	1987,709
4	51,868	41,762	2690,289	1744,065	2166,111
5	49,280	41,762	2428,518	1744,065	2058,031
6	47,644	41,762	2269,951	1744,065	1989,709
7	51,349	51,091	2636,720	2610,290	2623,472
8	49,280	48,557	2428,518	2357,782	2392,889
9	50,028	51,589	2502,801	2661,425	2580,894
10	41,129	43,105	1691,595	1858,041	1772,866
11	42,402	41,762	1797,930	1744,065	1770,792
12	46,558	41,762	2167,647	1744,065	1944,355
13	47,644	36,559	2269,951	1336,560	1741,817
14	47,973	33,404	2301,409	1115,827	1602,490
15	36,066	30,413	1300,756	924,951	1096,875
16	48,843	43,105	2385,639	1858,041	2105,378
17	51,868	47,039	2690,289	2212,668	2439,819
18	47,947	44,233	2298,915	1956,558	2120,840
19	50,151	40,199	2515,123	1615,960	2016,020
20	53,635	46,994	2876,713	2208,436	2520,523
21	34,609	36,205	1197,783	1310,802	1253,019
22	30,336	21,591	920,273	466,171	654,985
23	35,343	28,034	1249,128	785,905	990,806
24	41,642	44,762	1734,056	2003,637	1863,979
25	34,095	20,397	1162,469	416,038	695,436
26	38,196	48,514	1458,934	2353,608	1853,041
27	24,968	26,950	623,401	726,303	672,888
28	34,956	31,012	1221,922	961,744	1084,055
29	24,072	21,936	579,461	481,188	528,043
30	44,800	43,836	2007,040	1921,595	1963,853
Jumlah	**1307,976**	**1167,066**	**59041,745**	**47667,383**	**52505,752**

4.2.2.2 Estimasi Persamaan Regressi

Sebelum diuji pengaruh pengawasan fungsional (X) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada pemerintah Kota Bandung, terlebih dahulu dihitung koefisien regressi. Menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.70, dapat diestimasi persamaan regressi menggunakan rumus sebagai berikut:

Konstanta (a)

$$a = \frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$a = \frac{(59041,745)\times(1167,066) - (1307,976 \times 52505,752)}{30\times(59041,745) - (1307,976)^2}$$

$$a = \frac{68905613,093 - 68676263,346}{1771252,348 - 1710801,217}$$

$$a = \frac{229349,747}{60451,131}$$

$$a = 3,794$$

Koefisien regressi variabel X (b)

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$b = \frac{30\times(52505,752) - (1307,976 \times 1167,066)}{30\times(59041,745) - (1307,976)^2}$$

$$b = \frac{1575172,557 - 1526494,318}{1771252,348 - 1710801,217}$$

$$b = \frac{48678,239}{60451,131}$$

$$b = 0,805$$

Menggunakan software SPSS 15 for windows, diperoleh hasil regressi pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti pada tabel berikut ini

Tabel 4.64
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.794	5.785		.656	.517
	Pengawasan	.805	.130	.759	6.175	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas

Melalui hasil regressi yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 3,794 + 0,805 X

Dimana : Y = Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

X = Pengawasan fungsional

Nilai konstanta (a) sebesar 3,794 menunjukkan nilai rata-rata efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung apabila pengawasan fungsional bernilai nol. Kemudian nilai koefisien regressi (b) sebesar 0,805 menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung apabila pengawasan fungsional ditingkatkan sebesar satu satuan.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik pengawasan fungsional diduga akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung. Sebaliknya, semakin tidak baik pengawasan fungsional diduga akan

menurunkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung.

4.2.2.3 Analisis Korelasi

Keeratan hubungan antara variabel pengawasan fungsional dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah diukur melalui koefisien korelasi. Korelasi antara pengawasan fungsional dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dihitung menggunakan korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut.

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{30 \times 52505,752 - \left(1307,976 \times 1167,066\right)}{\sqrt{\left[\left(30 \times \left(59041,745\right) - \left(1307,976\right)^2\right) \times \left(30 \times \left(47667,383\right) - \left(1167,066\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{1575172,557 - 1526494,318}{\sqrt{\left[\left(1771252,348 - 1710801,217\right) \times \left(1430021,484 - 1362043,048\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{48678,239}{\sqrt{60451,131 \times 67978,436}}$$

$$r_{XY} = \frac{48678,239}{64104,394}$$

$$r_{XY} = 0,759$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 15 for windows, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara pengawasan

fungsional dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.65
Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Correlations

		Efektivitas	Pengawasan
Pearson Correlation	Efektivitas	1.000	.759
	Pengawasan	.759	1.000
Sig. (1-tailed)	Efektivitas	.	.000
	Pengawasan	.000	.
N	Efektivitas	30	30
	Pengawasan	30	30

Melalui hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antara variabel pengawasan fungsional dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,759. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara pengawasan fungsional dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung . Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan fungsional akan membuat efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik pengawasan fungsional akan membuat efektivitas pengelolaan keuangan daerah makin turun.

4.2.2.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel

dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan software SPSS 15 for windows sebagai berikut

Tabel 4.66
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.759[a]	.577	.562	5.85340

a. Predictors: (Constant), Pengawasan

b. Dependent Variable: Efektivitas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,577, nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

KD = 0,577 x 100% = 57,7%

Koefisien determinasi sebesar 57,7% menunjukkan bahwa 57,7% perubahan yang terjadi pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung bisa dijelaskan oleh pengawasan fungsional. Artinya pengawasan fungsional mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung sebesar 57,7 persen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 42,3% dijelaskan variabel lain di luar variabel pengawasan fungsional

4.2.2.5 Uji Signifikansi

Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan pada tabel 4.66 di atas, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui persamaan regresi yang diperoleh di atas akan diuji apakah pengawasan

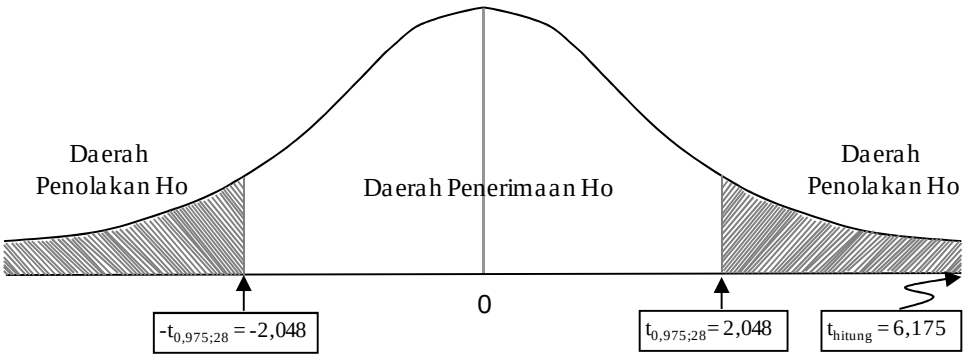
fungsional benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung. Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$t_{hitung} = r_{xy} \times \sqrt{\frac{n-2}{1-\left(r_{xy}\right)^2}}$$

$$t_{hitung} = 0,759 \times \sqrt{\frac{30-2}{1-\left(0,759\right)^2}}$$

$$t_{hitung} = 6,175$$

Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,175, sementara pada tabel t dengan tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas (30-2) = 28 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,048. Karena t_{hitung} (6,175) lebih besar dari t_{tabel} (2,048), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengawasan fungsional signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung.



Gambar 4.1

Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

Dari hasil semua pernitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional mempunyai korelasi yang kuat dan positif (+) terhadap keuangan daerah, ditunjukkan oleh angka hasil korelasi yang kuat yaitu sebesar 0,759. Ini berarti bahwa semakin besar pengawasan fungsional akan membuat keuangan daerah semakin tinggi

Keberadaan pengawasan fungsional juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keuangan daerah, ditunjukkan oleh besarnya t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu 6,175 > 2,048. Hal ini membuktikan hipotesis penelitian bahwa pengawasan Fungsional berpengaruh dalam keuangan daerah.

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun menggunakan *SPSS 15.0 For Windows*, hasilnya adalah pengawasan fungsional dan keuangan daerah sudah baik, serta adanya pengaruh yang kuat dan signifikan antara pengawasan fungsional terhadap keuangan daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim bahwa :

> "Dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah pengawasan fungsional mutlak dilaksanakan sehingga keefektifan, keefisienan dan keekonomisan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat di capai"
>
> (2004:312)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional pada Inspektorat kota Bandung, telah berjalan dengan baik sehingga keuangan daerah juga baik. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim.